

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) adalah lembaga pendidikan formal yang bertujuan untuk menyiapkan lulusannya menghadapi dunia kerja agar memiliki pengetahuan, keterampilan, keahlian dan akhirnya memiliki kesiapan kerja setelah menyelesaikan pendidikannya. Lebih lanjut Evans dalam Djojonegoro (1999), mendefinisikan bahwa pendidikan kejuruan adalah bagian dari sistem pendidikan yang mempersiapkan seseorang agar lebih mampu bekerja pada suatu kelompok pekerjaan atau satu bidang pekerjaan dari pada bidang-bidang pekerjaan lainnya. Dengan demikian, pendidikan menengah kejuruan (SMK) yang berfungsi untuk mempersiapkan siswa agar siap bekerja setelah lulus.

Menurut Siswoyo (2008: 79), bahwa pendidikan mempunyai tiga fungsi, yaitu fungsi pertama menyiapkan sebagai manusia, fungsi kedua menyiapkan tenaga kerja, dan fungsi ketiga menyiapkan warga negara yang baik. Dari fungsi kedua mengenai menyiapkan tenaga kerja juga dijelaskan dalam UU No 20 Tahun 2003 yang isinya pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan siswa untuk bekerja dalam bidang tertentu.

Dengan fungsi yang tertera pada UU No 20 Tahun 2003 diatas, berbanding terbalik dengan realitas di lapangan, seperti dalam data yang telah tercatat oleh Badan Pusat Statistik. Menurut data dari Badan Pusat Statistik

(BPS), jumlah angkatan kerja pada Februari 2018 sebanyak 133,94 juta orang, naik 2,39 juta orang dibanding Februari 2017. Sejalan dengan itu, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 69,20 persen, meningkat 0,18 persen poin. Dalam setahun terakhir pengangguran berkurang 140 ribu orang, sejalan dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang turun menjadi 5,13 persen pada Februari 2018. Dilihat dari tingkat pendidikan, TPT untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) tertinggi diantara tingkat pendidikan lain, yaitu sebesar 8,92 persen. Dan menurut BPS provinsi D.I. Yogyakarta TPT di D.I Yogyakarta pada Februari 2018 sebesar 3,06 persen, mengalami peningkatan 0,22 persen poin dibanding TPT Februari 2017 sebesar 2,84 persen. Data-data tersebut menunjukkan bahwa fungsi pendidikan kejuruan tidak berjalan secara maksimal, karena masih tingginya tingkat pengangguran bagi lulusan SMK.

Dalam mengantisipasi hal tersebut, sebenarnya pemerintah melalui Depdiknas sudah mengambil langkah-langkah penyesuaian dengan dunia Industri yang dikenal dengan istilah 12 Kebijakan Dikmenjur (Kurikulum, 1993). Prinsip/Kebijakan Dikmenjur tersebut salah satunya yaitu program *Link and Match* yang dijalankan melalui Program Pendidikan Sistem Ganda dan dikenal dengan Praktik Kerja Industri (PRAKERIN). Namun dalam penerapannya, kembali lagi pada peran sekolah menengah kejuruan (SMK) untuk mengoptimalkan Praktik Kerja Industri (PRAKERIN) tersebut.

Prakerin dilaksanakan bertujuan untuk membentuk lulusan yang siap bekerja, selanjutnya diharapkan mampu memberikan pengalaman bagi siswa

terhadap dunia kerja dibidangnya, selain itu siswa yang telah melaksanakan prakerin diharapkan sudah tidak canggung dan dapat bertanggung jawab terhadap lingkungan kerja. Lulusan SMK juga diwajibkan harus memiliki kesiapan kerja yang baik, guna memenangkan persaingan di dunia kerja. Dengan begitu perlu adanya suatu kurikulum yang harus dipelajari dan dipahami sesuai tuntutan dunia kerja, serta perlu diberikan keterampilan tambahan yang mendukung dibidang yang sedang ditekuni oleh siswa.

Dalam pelaksanaannya, SMK harus siap dalam menyelenggarakan praktek kerja industri, persiapan yang perlu diperhatikan diantaranya dari waktu penyelenggaraan, pembekalan untuk siswa, tempat prakerin yang sesuai dengan kompetensi keahlian siswa, jadwal monitoring, proses bimbingan untuk siswa, dan kesiapan siswa. Namun berdasarkan hasil dari observasi mengenai Praktik Kerja Industri (PRAKERIN) yang dilakukan di SMK Negeri 1 Cangkringan, masih memiliki masalah yang perlu dilakukan pembenahan, terutama pada kompetensi keahlian Teknik Kendaraan Ringan (TKR). Untuk mengetahui permasalahan mengenai prakerin di SMK Negeri 1 Cangkringan secara jelas, maka perlu melihat pelaksanaannya mulai dari tahap awal hingga akhir.

Pada tahap awal pelaksanaan prakerin, pihak sekolah seharusnya memberikan arahan kepada siswa, mengenai tempat prakerin yang sesuai dengan kompetensi keahliannya. Pihak sekolah dapat mengarahkan siswa, untuk melaksanakan prakerin di perusahaan atau bengkel resmi, yang memiliki perlengkapan alat memadai sesuai *Standar Operasional Prosedur*

(SOP). Hal tersebut bertujuan agar siswa dapat mengaplikasikan dan mengembangkan ilmu yang diperoleh dari sekolah saat melaksanakan prakerin, sehingga dapat diterapkan dengan baik di industri. Namun pada kenyataannya, siswa di SMK Negeri 1 Cangkringan masih banyak yang melaksanakan prakerin tidak di bengkel resmi, data menunjukkan bahwa dari 61 siswa yang terbagi dalam 23 kelompok, hanya 5 kelompok yang prakerin di bengkel resmi.

Tahap selanjutnya, pihak sekolah seharusnya memberikan arahan mengenai proses prakerin yang baik dan benar, dengan membekali siswa saat pembekalan. Proses pembekalan tersebut bertujuan memberikan bekal pengetahuan kepada siswa, mengenai cara untuk bersikap, cara bertanggung jawab dalam kehadiran saat prakerin, dan bertanggung jawab saat menyelesaikan pekerjaan di perusahaan. Namun proses pembekalan di SMK Negeri 1 Cangkringan kurang maksimal, hal ini dikarenakan masih terkendala dengan waktu yang terbatas.

Secara umum pembekalan prakerin bagi siswa sangatlah penting, terlebih untuk mengetahui peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pihak sekolah dalam pelaksanaan prakerin, yaitu mengenai kewajiban siswa untuk laporan setelah prakerin, ketentuan penulisan dan susunan laporan prakerin, serta peraturan lainnya. Dengan demikian pihak sekolah akan memberikan buku panduan prakerin kepada siswa, sebagai pedoman siswa agar tidak kesulitan dalam pembuatan laporan prakerin dan dapat diselesaikan tepat waktu. Namun pada kenyataannya, siswa di SMK Negeri 1 Cangkringan

masih mengalami banyak kesulitan untuk menyelesaikan laporan prakerin, sehingga berdampak pada keterlambatan penyelesaian laporan dari waktu yang ditetapkan sekolah yaitu satu minggu setelah pelaksanaan prakerin. Begitu juga terhadap permasalahan guru pembimbing prakerin di SMK Negeri 1 Cangkringan, yang mengalami keterlambatan dalam proses penilaian hasil prakerin siswa.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dalam pelaksanaan prakerin, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Program Praktik Kerja Industri Kompetensi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan di SMK Negeri 1 Cangkringan Sleman”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang terjadi dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Tercatat dari data Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan Februari 2018 sebanyak 133,94 juta orang, naik 2,39 juta orang di banding bulan Februari 2017. Dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 69,20 persen, meningkat 0,18 persen yang artinya dalam setahun pengangguran berkurang 140 ribu orang. Permasalahannya yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dari SMK tertinggi diantara tingkat pendidikan lainnya, yaitu sebesar 8,92 persen pada periode Februari 2018.

2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) masih mengalami peningkatan dibandingkan pada bulan Februari 2017, yaitu dari 2,84 persen menjadi 3,06 persen, mengalami peningkatan 0,22 persen.
3. Tempat pelaksanaan prakerin siswa masih sedikit yang tergolong dari bengkel resmi, yaitu 23 kelompok dari 61 siswa atau hanya 5 kelompok dari 14 siswa yang prakerin di bengkel resmi.
4. Penyelesaian laporan prakerin belum tepat waktu dari waktu yang sudah ditentukan, yaitu satu minggu setelah pelaksanaan prakerin di industri.

C. Batasan Masalah

Peneliti membatasi masalah mengenai penyelesaian laporan prakerin yang belum tepat waktu sesuai dengan waktu yang ditentukan di SMK Negeri 1 Cangkringan. Dengan meneliti tentang pembekalan, pelaksanaan dan evaluasi Praktik Kerja Industri (PRAKERIN) dari tahap penyebaran angket, evaluasi, pengumpulan dokumentasi sampai tahap diagnosis yaitu tahap penentuan hasil pelaksanaan Praktik Kerja Industri (PRAKERIN) pada kompetensi keahlian Teknik Kendaraan Ringan di SMK N 1 Cangkringan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada batasan masalah mengenai penyelesaian laporan prakerin yang belum tepat waktu yang sudah ditentukan di SMK N 1 Cangkringan, maka dapat dirumuskan masalah penelitian, yaitu:

1. Bagaimana pembekalan Praktik Kerja Industri (PRAKERIN) kompetensi keahlian Teknik Kendaraan Ringan di SMK Negeri 1 cangkringan?

2. Bagaimana pelaksanaan Praktik Kerja Industri (PRAKERIN) kompetensi keahlian Teknik Kendaraan Ringan di SMK Negeri 1 cangkringan?
3. Bagaimana evaluasi Praktik Kerja Industri (PRAKERIN) kompetensi keahlian Teknik Kendaraan Ringan di SMK Negeri 1 cangkringan?

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan dan diidentifikasi, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Pembekalan Praktik Kerja Industri (PRAKERIN) kompetensi keahlian Teknik Kendaraan Ringan di SMK Negeri 1 cangkringan.
2. Pelaksanaan Praktik Kerja Industri (PRAKERIN) kompetensi keahlian Teknik Kendaraan Ringan di SMK Negeri 1 cangkringan.
3. Evaluasi Praktik Kerja Industri (PRAKERIN) kompetensi keahlian Teknik Kendaraan Ringan di SMK Negeri 1 cangkringan.

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan layanan bagi siapa saja dalam bidang pendidikan khususnya tentang Pelaksanaan Praktik Kerja Industri (PRAKERIN) Kompetensi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan dapat digunakan sebagai acuan untuk melakukan penelitian yang relevan pada masa yang akan datang. Selanjutnya memberikan manfaat bagi:

1. Bagi Peneliti
 - a. Meningkatkan wawasan pengetahuan, khususnya dalam hal proses belajar mengajar di sekolah.

- b. Meningkatkan pengetahuan tentang pentingnya pelaksanaan praktik kerja industri (PRAKERIN) yang baik dan benar.
2. Bagi Siswa, yaitu dapat meningkatkan pelaksanaan Praktik Kerja Industri yang berkuaitas.
3. Bagi Guru
 - a. Meningkatkan kualitas profesionalisme dalam setiap pelaksanaan Praktik Kerja Industri (PRAKERIN).
 - b. Memberikan pembinaan lebih lanjut kepada siswa sehubungan dalam proses pelaksanaan Praktik Kerja Industri (PRAKERIN).
4. Bagi Sekolah
 - a. Membawa perbaikan mutu sekolah melalui peningkatan kualitas Praktik Kerja Industri (PRAKERIN), sehingga dapat menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya.
 - b. Sebagai pedoman untuk mengambil keputusan khususnya tentang tindaklanjut penerapan dalam pelaksanaan Praktik Kerja Industri (PRAKERIN).
5. Bagi industri/perusahaan, dapat dijadikan dokumentasi bagi pihak industri sebagai referensi untuk siswa selanjutnya yang prakerin di bengkel tersebut.